

# **SISTEM PENGENDALIAN, PENGELOLAAN DAN PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan  
Pendidikan Strata-1 pada Program Studi Akuntansi  
dan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

## **KARYA TULIS ILMIAH**

Oleh :

**FIRDAUS**  
**NIM. 1124090**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
ROKAN HULU  
2015**

## SURAT PERNYATAAN SUMBER TULISAN ARTIKEL ILMIAH

Saya yang menandatangani Surat Pernyataan ini:

NAMA : FIRDAUS  
NIM : 1124090

1. Menyatakan bahwa Artikel Ilmiah yang saya tuliskan benar bersumber dari kegiatan penelitian/perencanaan yang telah dilakukan sendiri oleh penulis bukan pihak lain.
2. Naskah ini belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, 31 Agustus 2015  
Yang membuat pernyataan,



Firdaus  
NIM. 1124090

Pembimbing I,

Hj. Fitrianti IS, SE, MM  
NIDN. 1012027301

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi

Hj. Sri Yunawati, M. Acc  
NIDN. 1009018501

**SISTEM PENGENDALIAN, PENGELOLAAN DAN  
PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU**

KARYA TULIS ILMIAH

Oleh:

**FIRDAUS**  
**NIM: 1124090**

Telah dimajukan untuk diuji pada tanggal 31 Agustus 2015

**Disetujui Oleh :**

PEMBIMBING I



Hj. FITRIYATI S., SE., MM  
NIDN. 1012027301

PEMBIMBING II



AFRIYANTO, SE., M.Ak, Ak, CA  
NIDN. 1016047401

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Sarjana

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI



Hj. SRI YUNAWATI, M.Acc  
NIDN. 1009018501

SISTEM PENGENDALIAN, PENGELOLAAN DAN PENCATATAN BARANG  
MILIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh: FIRDAUS

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan mendapatkan informasi serta penjelasan mengenai Sistem pengendalian, mekanisme pengelolaan, pencatatan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu. Objek penelitian ini adalah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu. Pengujian dilakukan dengan melakukan analisis atas sistem pengendalian, pencatatan dan pengelolaan barang milik daerah yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu melalui pengumpulan data berupa studi dokumentasi, wawancara maupun langsung melakukan observasi ke lokasi penelitian.

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini digunakan karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang bersifat komprehensif serta mendalam mengenai Sistem Pengendalian Pengelolaan dan Pencatatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini didasarkan pada teori –teori yang mendukung sebagai landasan teoritis dalam menganalisa data di lapangan dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku sehingga didapat hasil yang diinginkan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian terhadap pengelolaan dan pencatatan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Terhadap proses pengelolaan dan pencatatan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu belum sepenuhnya memadai, karena masih dijumpainya beberapa permasalahan dan kelemahan antara pada proses penerimaan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah, pada proses inventarisasi, serta pada proses pengamanan dan proses pemeliharaan barang.

**Keywords : Control, management and recording of goods belonging to the area.**

**CONTROL SYSTEM , MANAGEMENT AND LISTING OF PROPERTY  
DEPARTMENT OF HEALTH  
DISTRICT ROKAN UPSTREAM**

By :FIRDAUS

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the condition and obtain information and an explanation of the control system, management mechanism, the recording property in the county Health Department Rokan Hulu. The object of this research is the Health Department Rokan Hulu. Testing is done by analyzing the control system, record keeping and asset management area in Rokan Hulu District Health Office through data collection based on studies documentation, interviews and direct observation to the study site.

The research design used in this study is a qualitative research. This type of research is used because researchers want to obtain a comprehensive picture of the nature and depth of the Management Control System and Regional Property Registration at Public Health Service Rokan Hulu. The study was based on the theory that supports theories the theoretical foundation for analyzing data in the field by matching between empirical reality with the prevailing theory in order to get the desired results of this study.

The result shows that the control system for the management and recording of goods belonging to the local Health Department Rokan Hulu refers to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 17 Year 2007 regarding Technical guidelines Regional Property Management. Against the process of managing and recording property in the area Rokan Hulu District Health Office is not fully adequate, because they still encounter some problems and weaknesses among the admissions process storage and distribution of goods belonging to the area, the inventory process, as well as on the process of securing and maintaining the goods.

**Keyword: The Using, Accounting information system, cash in and outflow**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Setelah diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 telah terjadi perubahan paradigma yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yang semula berorientasi sentralistik menjadi desentralistik. Salah satu aspek penting kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi yang paling menonjol adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

Dalam rangka peningkatan pelayanan tersebut tentunya aset milik pemerintah merupakan unsur vital untuk mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Hal ini tentunya lebih penting lagi bagi pemerintah daerah manakala era otonomi daerah tengah digalakkan.

Pengelolaan aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pengelolaan keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan aset. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya seiring waktu.

Karakteristik pemilikan barang milik pemerintah, antara lain pengadaannya tidak selalu melalui kegiatan *procurement* melainkan merupakan aset sejak pemerintah ada. Sejalan dengan konsep *clean government*, maka pengelolaan barang milik negara dan daerah perlu diarahkan kepada fungsi kebermanfaatannya bagi publik semaksimal mungkin. Oleh karena itu, barang daerah harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.

Sehubungan dengan hal itu, terdapat beberapa pengaturan oleh pemerintah mengenai pengelolaan barang guna pencapaian tujuan otonomi daerah. Pengaturan oleh pemerintah tersebut, terakhir dengan diterbitkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah dimaksud, kemudian diterbitkan secara khusus kebijakan teknis dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, di dalamnya mengatur antara lain mengenai kewenangan, tugas dan fungsi pengelola, pengguna kuasa barang, dan kegiatan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya memerlukan sebuah sistem pengelolaan dan pengendalian barang milik daerah yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai tujuan pengelolaan barang milik daerah secara terencana, terintegrasi, dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, dibutuhkan suatu sarana yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan atas barang milik daerah/aset.

Berdasarkan uraian di atas, penting rasanya mengetahui tentang sistem pengendalian serta manajemen pengelolaan dan pencatatan barang daerah sehingga dapat dijadikan acuan bagaimana sistem pengendalian terhadap pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**SISTEM PENGENDALIAN, PENGELOLAAN DAN PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ROKAN HULU**”

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang timbul yaitu:

1. Bagaimana sistem pengendalian barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana mekanisme pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu?

3. Bagaimana prosedur pencatatan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian yang ada terhadap barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pencatatan barang milik daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis  
Menambah pengetahuan dan wawasan baik dalam hal penelitian maupun objek penelitian, yang dalam hal ini adalah sistem pengendalian terhadap pengelolaan dan pencatatan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dalam pengendalian terhadap pengelolaan dan pencatatan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Sistem Secara Umum**

Sistem menurut W. Gwerald Cole adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan satu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, pengertian sistem yang lainnya adalah Sistem berasal dari bahasa latin (systēma) dan bahasa Yunani(sustēma) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran

informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggerak yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan pekerjaan (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi (Baridwan, 1991). Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
4. Penggunaan;
5. Penatausahaan;
6. Pemafaatan;
7. Pengamanan dan pemeliharaan;
8. Penilaian;
9. Penghapusan;
10. Pemindahtanganan;
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
12. Pembiayaan; dan
13. Tuntutan ganti rugi.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu dimana penelitian ini akan membahas mengenai sistem pengendalian terhadap barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

#### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk kepada jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis

berusaha untuk mengungkapkan tentang bagaimana Sistem Pengendalian Terhadap Pengelolaan dan Pencatatan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

#### Jenis dan Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan aparat Dinas Kesehatan dan pejabat yang mengelola barang daerah yaitu pengurus barang dan penyimpan barang.

##### 2. Data Sekunder

Data yang telah diolah yang diperoleh dari objek penelitian berupa Peraturan Daerah Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dan data lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari buku-buku, jurnal, maupun sumber data lain yang mendukung penelitian ini.
2. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pengendalian barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu seperti Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

#### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menganalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

#### Jadwal Penelitian

Supaya penelitian ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan maka diperlukan adanya jadwal penelitian sehingga dapat mencapai target waktu yang telah ditetapkan. Jadwal penelitian lengkap penulis sajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1  
Jadwal Penelitian

Tahap Penelitian	Uraian Kegiatan	Waktu
Penyusunan proposal	1. Pengajuan judul 2. Rencana pencarian data 3. Pembuatan proposal 3 bab 4. Revisi dengan pembimbing 1 dan 2	26 minggu
Seminar Proposal	Pelaksanaan ujian seminar proposal	1 minggu
Penyusunan Skripsi	1. Penyusunan data penelitian 2. Perbaikan Proposal 3 bab 3. Pembuatan skripsi bab 4 dan bab 5 4. Revisi dengan pembimbing 1 dan 2	14 minggu
Sidang Skripsi	Pelaksanaan Ujian Sidang Skripsi	1 minggu
	<b>Total Kebutuhan Waktu</b>	42 minggu (8 Bulan)



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Hasil Penelitian

Kabupaten Rokan Hulu berdiri sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta dan oleh Gubernur Riau diresmikan pula operasional Pemerintah Daerahnya pada tanggal 5 Desember 2009. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu, agar terwujud masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang sejahtera lahir dan batin berlandaskan Iman dan Taqwa.

Tahun 2011 tepatnya pada tanggal 29 Juli 2011 Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu No. 4 Tahun 2011 dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5) Badan Kepegawaian Daerah;
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 8) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- 9) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- 10) Badan Lingkungan Hidup;
- 11) Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal;
- 12) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- 13) **Dinas Kesehatan**;
- 14) Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- 15) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya;

- 16) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 17) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 18) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 19) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- 20) Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- 21) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 22) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- 23) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 24) Dinas Perikanan dan Peternakan;
- 25) Dinas Pertambangan dan Energi;
- 26) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 27) Rumah Sakit Umum Daerah;
- 28) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 29) Kantor Perpustakaan dan Arsip;
- 30) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil;
- 31) Kecamatan;
- 32) Kelurahan.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan tentang bagaimana Sistem Pengendalian Pengelolaan dan Pencatatan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu:

1. Sistem Pengendalian pengelolaan dan pencatatan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu mengacu kepada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Terhadap proses pengelolaan dan pencatatan barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu belum sepenuhnya memadai, karena masih dijumpainya beberapa permasalahan dan kelemahan antara lain :
  - a. Dalam proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu belum membuat:
    - 1) Berita Acara Penerimaan Barang
    - 2) Buku Penerimaan Barang
    - 3) Buku Pengeluaran Barang
    - 4) Buku Barang Pakai Habis
    - 5) Kartu Barang
    - 6) Kartu Persediaan Barang

b. Dalam hal penyimpanan terhadap persediaan barang yang belum sepenuhnya memadai, hal ini disebabkan karena belum adanya gudang penyimpanan *stock* barang persediaan serta pengendalian terhadap barang persediaan juga belum dilakukan seperti adanya kartu persediaan ataupun catatan tentang jumlah *stock* barang persediaan. Serta proses *stock opmane* persediaan juga belum dilakukan.

c. Dalam proses inventarisasi tersebut dijumpai beberapa barang milik daerah pada Dinas Kesehatan yang tidak sesuai dengan jumlah yang ada pada buku inventaris yaitu :

- 1) Beberapa barang masih tercatat dalam buku inventaris namun setelah dilakukan inventarisasi barang tersebut tidak dijumpai.
- 2) Terdapat barang yang telah dalam kondisi rusak berat namun dalam buku inventaris tidak tercatat sebagai barang yang rusak berat.
- 3) Barang yang telah rusak berat tersebut tidak dijumpai dan belum diusulkan untuk dihapuskan.

d. Dalam pengamanan barang milik daerah yaitu:

- 1) Pengamanan secara fisik yaitu belum adanya gudang untuk penyimpanan barang yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan.
- 2) Pengamanan secara administratif yaitu belum seluruhnya dilakukan pemasangan label kode lokasi dan kode barang berupa stiker yang merupakan salah satu upaya bentuk pengamanan secara administrasi terhadap barang milik daerah yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

e. Dalam proses pemeliharaan barang yaitu belum dilakukannya pencatatan dalam kartu pemeliharaan/perawatan barang dilakukan oleh pengurus barang, serta belum dibuatnya kartu pemeliharaan/perawatan yang memuat:

- 1) Nama barang inventaris;
- 2) Spesifikasinya;
- 3) Tanggal perawatan;
- 4) Jenis pekerjaan atau pemeliharaan;
- 5) Barang-barang atau bahan-bahan yang dipergunakan;
- 6) Biaya pemeliharaan/perawatan;
- 7) Yang melaksanakan pemeliharaan/perawatan;

f. Pada Proses Penghapusan yaitu terdapat beberapa barang yang tidak dijumpai serta barang yang telah dalam kondisi rusak berat, namun belum dilakukan usulan untuk melakukan penghapusan.

Pengurus Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan pencatatan terhadap seluruh barang pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai dengan rincian masing-masing jenis barang mulai dari KIB A untuk Tanah, KIB B untuk barang Peralatan dan Mesin, KIB C untuk mencatat Gedung dan Bangunan, KIB D untuk mencatat Jalan, Irigasi dan Jaringan, KIB E untuk mencatat aset tetap lainnya serta KIB F untuk mencatat konstruksi dalam pengerjaan.

#### **Saran**

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian pegawai pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu akan lebih baik lagi apabila buku kas umum yang digunakan diklasifikasikan menjadi buku kas masuk untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan buku kas keluar untuk mencatat transaksi pengeluaran kas, sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Sebaiknya tidak ada rangkap jabatan dalam suatu dinas, hal ini untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam sistem akuntansi penggajian.
3. Perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pemantauan pengendalian intern, guna meminimalisir kendala-kendala dalam sistem akuntansi penggajian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Tanjung, Abdul Hafiz. 2008. *Akuntansi Pemerintahan Daerah, Konsep dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat

Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*, Edisi Kedua : Salemba Empat

Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*, Bandung : Fokusmedia

Temuan, Sembiring. 2009. *Fungsi dan Tugas Inspektorat dalam Pengendalian Intern Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karo Sumatera*, Skripsi Universitas Sumatera Utara

Hartadi, Bambang. 1999. *Sistem Pengendalian Intern*, Yogyakarta : BPF

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi

Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Silalahi, Uber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung.: UNPAR Press

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta,.

**Peraturan Perundang-undangan:**

1. UU.No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Pemerintah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Barang Daerah.
5. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah